

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



BPK Perwakilan Provinsi Aceh Serahkan LHP atas LKPD TA 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh, Kamis (9 Mei 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, **Arif Fadillah, S.I.Kom.,MM.**, dan Walikota Banda Aceh dhi. diwakili oleh Wakil Walikota Banda Aceh, **Drs. H. Zainal Arifin**. Pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Banda Aceh atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, **Syafruddin Lubis, S.E., Ak. CA**. Dalam pidatonya, Bapak **Syafruddin Lubis** menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran penyajian** laporan keuangan. Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2018. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil mempertahankan Opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut adalah Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan SPI antara lain: (1) Pengelolaan Persediaan obat pada BLUD RSUD Meuraxa belum tertib; dan (2) Pengelolaan aset tetap belum tertib. Temuan Kepatuhan diantaranya terdapat: (1) Pembayaran tunjangan anggota DPRK tidak sesuai ketentuan; dan (2) Penganggaran dan pelaksanaan Bantuan Sosial pada Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Subbagian Humas dan TU Kalan